

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Stunting adalah terjadinya permasalahan terhadap tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi yang menghambat anak untuk bertumbuh seperti anak seusianya. Keadaan anak pada umumnya dipengaruhi dimulai dari sebelum lahir (masa kandungan). Pemenuhan gizi ibu dan status kesehatan sangat penting karena menjadi penentu stunting, apabila tidak terpenuhi maka akan mungkin melahirkan anak terhambat, membiarkan adanya gizi buruk dan dampaknya kemiskinan bagi diri sendiri dan negara (Unicef Indonesia, 2013). Gangguan pertumbuhan pada balita akan berdampak secara jangka pendek dan jangka panjang. Anak yang terdampak stunting ditandai dengan keadaan tubuh yang pendek, jika dilihat dari standar pengukuran tinggi badan menurut usia yang dibuat oleh World Health Organization (WHO) (World Health Organization, 2015).

Stunting apabila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) berpotensi menimbulkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting berhubungan dengan masyarakat terkait kesehatan yang mengakibatkan resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada motorik/mental. *Growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak seimbang yang diperlihatkan dengan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, akan menyatakan kelompok balita yang lahir dengan berat badan tidak normal dan mengalami stunting karena tidak terpenuhi kebutuhan gizi (Kementerian Desa , 2017).

Adapun penyebab anak mengalami stunting yaitu faktor gizi buruk, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses kepada makanan bergizi, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting dilihat dari dua aspek yaitu berdasarkan jangka pendek adanya gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik,

dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, mudah sakit, beresiko mengalami penyakit diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya.

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu permasalahan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 % pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (paudpedia, 2022). Penurunan angka stunting ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP N0.72 Tahun 2021 dengan pemerintah mendorong dengan kebijakan, meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan terkait dengan program penurunan angka stunting di kelembagaan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting di Indonesia dengan target pencapaian 14% pada tahun 2023, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, regulator, dan pelaksana. Pemerintah mengarahkan dengan cara menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi/mengkoordinasi berbagai pihak dalam pelaksanaan penurunan stunting. Pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat. Melakukan pelaksanaan dengan pemerintah mewajibkan penyediaan pelayanan yang terbaik guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Rizal, 2021, p. 9).

Sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program penanganan stunting sehingga angka stunting di Indonesia dapat menjadi rendah. Dalam hal ini pemerintah

berperan dalam merealisasikan tujuan dari UUD 1945 terkhusus dalam mendapatkan hidup yang baik dan sehat melalui adanya pemberdayaan mencegah penyebaran stunting.

Pemerintahan berkomitmen memperbaiki gizi dalam membangun sumber daya, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua sektor, meningkatkan intervensi berbasis bukti yang efektif dikalangan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi. Presiden Joko Widodo menerapkan upaya dalam mencegah stunting dengan melakukan pendekatan multi-sektor melalui program gizi sehat yang diterapkan di setiap daerah (Kementerian Kesehatan, 2020). Melakukan advokasi tingkat tinggi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan kualitas hidup yang menjadi visi dari presiden RI yang sejalan dengan UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang Desa bahwa :

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat Desa”.

Program disusun melalui kegiatan penanganan stunting berskala desa dengan menggunakan dana desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melakukan kebijakan PMT, program perlindungan sosial, promotif edukasi melalui sosialisasi bagi masyarakat, menghimbau program Keluarga Berencana (KB) yang dananya dialokasikan sebesar Rp 44,8 triliun pada 2022. Anggaran itu terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun (Saptohutomo, 2022).

Penyebaran stunting di setiap provinsi memiliki total 884.037 (pendek), 288.065 (sangat pendek) dengan persentase kasus stunting secara keseluruhan 7.1 % (Negeri, 2023). Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan angka stunting yang cukup tinggi 17.5%, dan Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan prevalensi penyebaran stunting yang kecil yaitu 2,4 %. Jika dibandingkan pada tahun 2022 NTT menempati posisi teratas sebesar 35.3%, yang disusul Sulawesi Barat sebesar 35%. Provinsi Bali menempati peringkat terakhir dengan persentase 8%. Dari keseluruhan daerah maka adanya pemilihan 10 wilayah prioritas dari 100 kabupaten/kota dengan koefisien stunting terbesar pada setiap wilayah. Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan keterwakilan antar pulau di Indonesia. Untuk menentukannya dilihat dari jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, tingkat kemiskinan desa, dan penderita gizi buruk desa. Anggaran program penurunan stunting tahun 2023 di Kementerian/Lembaga dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Hingga 30 September 2023, realisasi dari anggaran ini adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen (Kementerian Keuangan, 2023). Kementerian Keuangan juga mengalokasikan pemanfaatan dana desa untuk BLT Desa sebesar 40% dalam rangka pengoptimalan program perlindungan sosial termasuk pencegahan stunting dan penanganan stunting.

Desa menjadi pilar utama untuk memutus angka stunting sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dijelaskan dalam pasal 1 (Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1: 2013) yang bertujuan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan desa yang berintegritas serta berkelanjutan menuju desa yang mandiri, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan (Paul, 1948)

PKK adalah lembaga pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang berskala nasional yang berfokus pada pembangunan masyarakat, dalam prosesnya pembangunan tersebut tumbuh dari bawah yaitu dari masyarakat itu sendiri, lahir atas kesadaran dan inisiasi masyarakat, pelaksanaannya dijalankan oleh, dari dan untuk masyarakat (Tim Penggerak PKK Pusat, 2015). PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Menjadi organisasi yang aktif melakukan pendataan potensi terhadap masing masing keluarga dan masyarakat, menggerakkan peran masyarakat, serta mengendalikan 10 program pokok fungsi dari PKK.

PKK menjadi garda depan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah mencetuskan adanya gerakan PKK bermula dari seminar *Home Economic* pada tahun 1957 sehingga pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada pendidikan PKK. Kementerian pada saat itu menyusun 10 segi kehidupan keluarga, gerakan ini bermula dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah (Isriati Moenadi) karena keadaan masyarakat yang menderita busung lapar ( Tim Penggerak PKK, 2018). Gerakan PKK terus berlanjut hingga pada era pemerintahan saat ini karena gerakan PKK memiliki sistem yang cukup rapi dan terpusat. Memiliki TP PKK Pusat yang membuat program program secara nasional, kemudian program disalurkan ke TP PKK Provinsi,kabupaten/kota,kecamatan, dan desa. TP PKK diarahkan membantu pemerintah menyelesaikan masalah *stunting* yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah terutama di pedesaan. (Ditjen Bina Adwil, 2024).

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang padat penduduk sebanyak 41.416.407 jiwa, sehingga anak *stunting* secara jumlah masih besar meskipun prevalensinya menurun (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023). Kabupaten Jember menempati posisi pertama dengan angka 34.9%, dan posisi terakhir yaitu kota

surabaya 4,8%. Kabupaten Kediri berada di posisi ke 14 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri kasus stunting di Kediri mengalami penurunan dari 13,55% menjadi 9,2%. (Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, 2023). Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.23 tahun 2014 tentang upaya Perbaikan Gizi, Peraturan menteri keuangan No.61/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting yang terintegrasi. Kecamatan Kayen Kidul turut mengambil peran untuk memanfaatkan akomodasi yang diberikan kepada 12 desa yang ada. Salah satunya adalah Desa Bangsongan yang aktif dalam memberdayakan masyarakat untuk menangani permasalahan stunting.

Permasalahan stunting di Desa Bangsongan merupakan prioritas pemerintahan desa dalam menggunakan dana desa. Hal ini, dikarenakan dari tahun 2022 adanya peningkatan penderita stunting dikalangan masyarakat berdasarkan data data posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai resiko dari stunting menjadi indikator permasalahan. PKK Bangsongan merupakan salah satu PKK yang turut aktif terhadap kegiatan PKK yang sudah di amanatkan, terutama terkait permasalahan stunting. PKK aktif dan cukup berhasil dalam mengelola permasalahan stunting dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dukungan dari pemerintahan desa terhadap kegiatan-kegiatan rutin terkait stunting mampu menciptakan komitmen PKK mengentaskan stunting. Pemahaman mengenai akar penyebaran stunting di Desa Bangsongan, dan peran dari puskesmas di Desa Bangsongan membentuk sinergitas penanganan stunting terhadap masyarakat desa agar terlibat menurunnya angka stunting di desa.

Berdasarkan indikasi yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PKK DALAM PENANGANAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANGSONGAN, KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka meningkatkan pembangunan desa, tentunya membutuhkan upaya yang mampu mengembangkan melalui pembinaan salah satu kelembagaan dalam desa yaitu PKK. PKK menjadi wadah organisasi di masyarakat desa yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, serta dalam kegiatan pertumbuhan desa. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Pemberdayaan menjadi peluang yang diciptakan, untuk meraih kesempatan, dilakukan dengan dorongan internal dan memberikan program program yang dirujuk pada kegiatan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dicetuskan 10 program pokok salah satunya kategori kesehatan dengan prioritas penanganan stunting dengan melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian Ibu, Bayi, dan Balita (AKI/AKB), menggerakkan keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat, dan Pembinaan Keluarga yang sadar Gizi (Kementerian Dalam Negeri, 2020). PKK memiliki pedoman dalam pencegahan stunting berdasarkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (BPK, 2021) menyatakan bahwa :

“Perpres ini antara lain mengatur: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) melaksanakan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan pelaksanaan penurunan stunting mencakup

kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan”.

Berdasarkan regulasi tersebut PKK dipahami dengan suatu praktik pembangunan ataupun pemberdayaan suatu komunitas yakni masyarakat, dengan aktifitas pelaksanaannya dimulai pada kelompok masyarakat itu sendiri, pengelolaan gerakan tersebut dijalankan oleh, dari dan untuk masyarakat. Melalui gerakan pemberdayaan masyarakat, masyarakat diharapkan dapat melihat, mengenali dan mengatasi masalah-masalah yang ada dan memiliki solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan dalam mendayagunakan keseluruhan potensi dan peluang yang dimiliki sebagai upaya mencapai kesejahteraan.

Stunting menjadi permasalahan prioritas di Desa Bangsongan karena mengalami kenaikan setiap bulannya dilihat dari angka kelahiran, gizi buruk, kemiskinan, dan pola asuh yang tidak sesuai. Kepengurusan PKK Desa Bangsongan mengadakan berbagai program guna untuk menangani stunting dan bagaimana mencegah penyebaran stunting. Kondisi gizi masyarakat yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sekitar 8% yang secara langsung disebabkan karena kerugian akibat penurunan produktivitas, rendahnya kualitas pendidikan, dan pengetahuan yang kurang.

Stunting berbahaya karena meningkatkan rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan menimbulkan penyakit kronis. PKK Desa Bangsongan memberikan peran dengan cara melakukan pendampingan terhadap keluarga yang persiapan punya anak, sedang hamil, dan memberikan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran keluarga terhadap penyakit stunting. Pendataan terhadap bayi/balita terdampak stunting akan diberikan penyuluhan serta bersama dengan Puskesmas Desa Bangsongan melalui program PMT, posyandu, dan demo masak. Berdasarkan pernyataan Bidan Desa Bangsongan bahwa angka penderita stunting di Bangsongan adalah 11% pada tahun 2023. Untuk itu, perlunya keterlibatan dari semua kelembagaan

pemerintahan Desa Bangsongan serta partisipasi masyarakat dalam mencegah stunting dengan mengikuti kegiatan program PKK yang sudah diatur penyelenggaraannya.

PKK memiliki peran penting dalam penanganan dan pencegahan stunting dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran kader, melalui pengembangan /pengorganisasian masyarakat. Dalam penanganan stunting PKK melakukan peningkatan gerakan kader melalui kunjungan ke rumah rumah, mendukung gerakan masyarakat sehat, menguatkan kegiatan posyandu, dan aktif dalam mengakses dan mendata penderita stunting secara online. Sehingga adanya verifikasi disetiap pelaksanaan program yang bisa memberikan penilaian,serta evaluasi kegiatan yang sudah dikerjakan. Adapun indikasi permasalahan yang ada di Desa Bangsongan yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan awal stunting. Hal ini bisa dilihat dari terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai stunting.
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk program pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan berdasarkan observasi peneliti tempat pelaksanaan program masih menggunakan gedung pemerintahan desa.
3. Tidak maksimalnya pendampingan dari instansi pemerintahan sehingga kurangnya koordinasi maupun evaluasi penyusunan program penanganan stunting.

Stunting merupakan peran dari Program Kerja 4 (POKJA) dengan melakukan pendataan terhadap masing masing RT/RW, dan menentukan sampel masyarakat yang sudah terdampak stunting. POKJA lainnya menjadi pendukung kegiatan POKJA 4, dengan melakukan survei lingkungan, undangan stunting, pelatihan,sekoper (sekolah perempuan), dan inovasi pembantuan ekonomi melalui UMKM Desa. Proses perencanaan kegiatan penanganan stunting ada 3 tahapan yaitu melalui musyawarah desa, musyawarah desa khusus, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Program penanganan stunting di Desa Bangsongan meskipun sudah dilaksanakan sesuai prosedural yang berlaku, adanya hambatan yang dirasakan oleh PKK dalam memaksimalkan perannya. Dimulai, dari persepsi masyarakat yang kurang tepat mengenai stunting dengan anggapan stunting terjadi karena faktor genetik, pertumbuhan yang terlambat namun tidak berbahaya, serta berasumsi bahwa stunting tidak memiliki dampak kedepannya. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan peran PKK, dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak merespon baik program yang sudah dilakukan di Desa Bangsongan. Pemberian anggaran yang kurang memadai oleh pemerintahan desa, ternyata berimplikasi terhadap pemenuhan persiapan, pelaksanaan beberapa program rutin penanganan stunting. Hal lain, karena pelaksanaan sosialisasi yang rutin disampaikan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan sehingga tidak adanya respon terkait pelaksanaan sosialisasi. Di sisi lain, kurangnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan peran PKK guna menangani stunting lebih optimal lagi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah cara dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan dalam mengurangi penderita stunting. Pemberdayaan dikatakan berhasil apabila peran dari PKK melalui usaha dan tindakan yang sudah dilaksanakan sesuai dengann harapan. PKK akan memberikan jasa berupa program yang bisa dilihat bagaimana pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana, sasaran, dan kegiatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Maka pemberdayaan masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian perencanaan berdasarkan proses yang telah dilakukan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program stunting akan mencapai tujuan dan dapat memberikan dampak hasil atau manfaat.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian permasalahan di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa saja langkah langkah yang dilakukan PKK dalam berperan menangani stunting di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana keterlibatan pemerintahan desa terhadap kegiatan penanganan stunting oleh PKK ?
3. Apa saja faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan stunting yang dilakukan PKK ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui langkah langkah yang dilakukan PKK dalam menangani permasalahan stunting di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui keterlibatan dari pemerintahan terhadap program penanganan stunting di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan penanganan stunting oleh PKK di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

##### **1.5.1 Signifikansi Akademik**

- 1 Fokus penelitian ini berkaitan dengan lembaga PKK dalam desa yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan penanganan stunting. Hal ini berkaitan dengan perubahan sosial dan pemerintahan pedesaan.
- 2 Penelitian ini dapat memberikan referensi ilmiah dan pemikiran kedepan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat dibidang permasalahan kesehatan.

##### **1.5.2 Tujuan Praktis**

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat desa melalui lembaga pemerintahan desa.

2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S.Sos pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.



### 1.6 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Masalah	Tujuan	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Penelitian dari Melany Putri, Andi Rosdianti Razak, Jaclan Usman yang berjudul <i>Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di</i>	1. Masalah penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalensi stunting karena gizi kronis yang dan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. 2. Penelitian ini berusaha menemukan adanya korelasi antara strategi pemberdayaan PKK dalam	1. Untuk mengetahui masalah stunting yang ada di masyarakat 2. Untuk melihat bagaimana PKK melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menangani kasus stunting.	Penelitian ini menggunakan teori strategi organisasi menurut Salusu (2006) dan konsep pemberdayaan masyarakat.	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deksriptif, yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat terkait	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PKK Kelurahan Bontolebang menunjukkan potensi peran PKK sebagai agen perubahan dalam upaya penanganan stunting dapat dilakukan dengan baik berdasar pada tahapan proses strategi. Implementasi strategi dilaksanakan dalam bentuk perwujudan program yaitu memaksimalkan program pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada.	1. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 2. Terkait dengan fokus penelitian, maka dari sejumlah penelitian terdahulu, berfokus terhadap kajian

	<i>Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Dalam Upaya Penanganan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19 (Jurnal).</i>	menangani stunting			permasalahan stunting.		tujuan dan prinsip pemberdayaan
2	Penelitian dari Febi Rama dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat	1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya stunting di desa (gangguan pertumbuhan pada anak).	1. Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat mengenai stunting di desa Pancasila,	Penelitian ini menggunakan konsep tahapan pemberdayaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe	Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu usaha pemberian kecakapan keterampilan atau kemampuan yang diberikan oleh pemerintah desa dengan pihak puskesmas pemberi keahlian terhadap	

	<p><i>t Dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan” (Jurnal)</i></p>	<p>2. Pemerintah desa Pancasila menerapkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan keterampilan, dan sosialisasi mengenai dampak dari stunting.</p>	<p>Lampung Selatan. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh desa untuk menanggulangi permasalahan stunting.</p>	<p>(Wrihatnolo )</p>	<p>deksriptif, yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat terkait permasalahan stunting.</p>	<p>keluarga penderita stunting untuk penanggulangan stunting untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, mental, dan sosial. Pemerintah desa membantu memecahkan masalah stunting.</p>	
<p><b>3</b></p>	<p>Penelitian dari Bastian Rahmadi, Rudi Saprudin, Sahadi</p>	<p>1. Permasalahan kesehatan pada balita yang akan mempengaruhi kondisi sejahtera serta pelaksanaan</p>	<p>1. Untuk mengetahui dampak stunting, dan tinjauan penanganan stunting secara</p>	<p>Penelitian ini menggunakan konsep tahapan pemberdayaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari berbagai</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang issue stunting, maka ketika</p>	

<p>Humaedi dengan judul <i>“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pencegahan Stunting (Jurnal)</i></p>	<p>fungsi sosial individu tersebut di kemudian hari. 2. Gerakan PKK dalam melakukan pemberdayaan dengan kegiatan pencegahan stunting agar masyarakat memiliki kapasitas, ekonomi, ekologi, dan sosial</p>	<p>terpadu oleh PKK. 2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat heradap program pemberdayaan yang dilakukan PKK melalui bidang promosi kesehatan</p>	<p>(Mochtar, 2016)</p>	<p>sumber referensi.</p>	<p>masyarakat sudah timbul awareness dapat membuat masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, perilaku sadar gizi, menerapkan pola asuh yang sesuai dan berpartisipasi aktif dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga mampu menciptakan aksi kolektif dalam menangani kasus stunting. Dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).</p>	
--	---	--	------------------------	--------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas kajian penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian peneliti. Dengan adanya tinjauan ini mampu memberikan pemperluas pembahasan penelitian. Sehingga dalam proses penulisan peneliti mampu merumuskan perbedaan penelitian yang dilakukan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah, bahwa dari sekian banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang peran PKK dalam ruang lingkup Kota/Kabupaten, tentu saja berbeda dengan pelaksanaan yang ada dilingkungan pedesaan. Jika dilihat dari kondisi penelitian ini, difokuskan pada ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan peran PKK di Bangsongan difokuskan pada Desa Bangsongan itu sendiri. Program penanganan stunting lebih difokuskan kepada anak yang sudah terdampak, berpotensi terdampak, dan pertahanan pangan Desa Bangsongan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa Bangsongan. Lokasi penelitian ini tidak pernah dijadikan tempat penelitian mengenai stunting sehingga memberikan pembaharuan data bagi peneliti. Penelitian pelaksanaan peran PKK dalam tahapan penurunan stunting di Bangsongan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial. Kemudian pada penelitian sebelumnya tidak memasukan pendanaan dengan menggunakan dana desa sehingga berbeda dengan penelitian yang sekarang. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat oleh PKK agar adanya pemahaman pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan partisipasi masyarakat sebagai penentu dan pelaksana kegiatan pemberdayaan. Dan mencegah dampak buruk dengan adanya anak stunting yang menghambat kemajuan desa. Peran dari pemerintahan desa Bangsongan yang menggunakan anggaran dana desa untuk program PKK yang akan mempengaruhi partisipasi dari masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat tinggi, artinya menunjukkan masyarakat memahami dan mengikuti kegiatan PKK sehingga melibatkan diri untuk mendukung PKK. Penelitian ini juga memfokuskan terhadap proses peran PKK berdasarkan pendekatan pemberdayaan yang telah terlaksana selama 1 tahun periode di Bangsongan.

## **1.7 Landasan Teoritik/Konseptual**

Pada penelitian ini peneliti memakai beberapa pendapat dan temuan terkait yaitu konsep pemberdayaan yang mendukung serta menjadi landasan berpikir yang dapat membatasi penelitian penulis sehingga tepat.

### **1.7.1 Konsep Pemberdayaan**

#### **1.7.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan dengan memiliki kemampuan menguasai orang lain. Pemberdayaan adalah cara yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat menjadi berdaya dengan kemandirian dan perubahan sosial yang lebih baik. Adanya kesempatan dalam mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas dan mutu hidup. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Dari kata tersebut bisa dimaknai bahwa proses menuju berdaya, memperoleh kekuatan/kemampuan, dan proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya (Sulistiyani, 2004).

Dengan kata lain pemberdayaan yakni memampukan dan memandirikan masyarakat. Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam penelitian yakni untuk masyarakat yang terkena stunting dan masyarakat agar terlepas dari pengetahuan yang kurang tentang Upaya dalam memperbaiki praktik pemberian makan, rangsangan psikososial, praktik kebersihan/higiyene, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan tinggi badan anak. Diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, yaitu bagi anak memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan dimasa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas.

Secara konseptual, adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto, sebagai berikut :

“pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘power’ yang berarti kekuasaan atau keberdayaan”. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup fisik, ekonomi. Maupun sosial, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Pemberdayaan pada umumnya difokuskan pada level komunitas” (Suharto, 2005, pp. 57-59).

Hal itu disebabkan karena komunitas dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat, dengan demikian apabila proses pembangunan harus dimulai dari bawah, maka awalnya harus berangkat dari kehidupan yang paling dasar. Dalam proses pembangunan yang menggunakan paradigma dan prespektif sebelumnya yang bersifat sentralistis, *top down* dan berorientasi keseragaman, masyarakat terbawah pada tingkat komunitas inilah yang paling termarginalisasi, sehingga apabila harus diberikan kepada mereka, oleh sebab itu, dalam level yang lebih operasional, proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan *community based development*, yang artinya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas.

### **1.7.2 Tahapan Strategi Pemberdayaan**

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan, strategi-strategi menurut Suharto memiliki tujuan akhir adanya kemandirian. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan

dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan (Suharto, 2005, p. 67):

1. Pemungkinan (*Enabling*), terciptanya keadaan yang memungkinkan dukungan yang dimunculkan berdasarkan analisis keberadaan kondisi dan potensi yang ada dalam masyarakat, untuk melakukan identifikasi/pengenalan penyebab permasalahan yang mampu diketahui sebagai penyebab permasalahan sehingga membebaskan kelompok masyarakat dari hambatan yang mengakibatkan lambatnya perkembangan masyarakat.
2. Penguatan (*Empowering*), melalui proses penguatan dilakukan untuk menguatkan permasalahan yang terjadi berdasarkan aspek peningkatan wawasan pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sebagai sasaran dalam upaya mengatasi permasalahan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, dan mempengaruhi kepentingan anggota masyarakat.
3. Perlindungan (*Protecting*), adanya upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sebagai sasaran agar tidak tertindas dalam mendapatkan berbagai sumber penghidupan yang layak.
4. Penyokongan (*Supporting*), melalui pendekatan ini adanya upaya pendampingan untuk memberikan bimbingan, dalam bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat sasaran. Adanya beberapa pihak yang mendukung mengatasi permasalahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Pemeliharaan (*fostering*), pendekatan ini dilakukan untuk memberikan kepastian keadaan masalah yang kondusif sehingga terus berlanjut dengan memastikan terjadinya keseimbangan dan keselarasan di tengah-tengah masyarakat, yang memiliki kekuasaan menentukan, dan mendistribusikan kekuasaan dan kebijakan terhadap kelompok masyarakat.

### **1.7.3 Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat terutama kelompok yang lemah yang tidak berdaya karena kondisi internal (diri sendiri), dan eksternal (lingkungann yang tidak adil) (Marjuki, 1986). Tujuan

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang diperbuat. Masyarakat yang mandiri ditandai dengan adanya kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan tindakan perpecahan masalah agar memiliki kemampuan daya yang kognitif. Kondisi kognitif merupakan perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai pembangunan dan pemberdayaan. Keadaan afektif adalah perasaan yang dimiliki dan diharapkan oleh masyarakat untuk menerimanya intervensi untuk mencapai pemberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan keterampilan fisiomotorik merupakan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pribadi upaya dukungan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (Adi, 2002).

Untuk mencapai kemandirian masyarakat memerlukan proses. Melalui dalam proses belajar, orang lambat laun akan memperoleh kemampuan masyarakat harus melalui proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran ini kemampuan/kekuatan akan diperoleh seiring berjalannya waktu. Demikian hal itu akan terjadi mengumpulkan kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Tujuan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan stunting adalah mencegah prevalensi anak berpotensi mengalami stunting, memberikan pemahaman dan pengetahuan, memberikan pelatihan melalui posyandu rutin yang setiap minggu dilaksanakan, pemberian bantuan makanan bergizi, dan memanfaatkan potensi desa sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan.

Gerakan perempuan PKK adalah wujud dari adanya feminisme pasca modern yang diaplikasikan melalui kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat. Adanya usaha dalam mencegah perbuatan melalui kegiatan yang memiliki gagasan dan tujuan yang baik. Melalui pemberdayaan perempuan mampu menyalurkan pemahaman berdasarkan permasalahan yang harus ditindak. Perempuan mengetahui penyebab opresi terhadap sesama kaum perempuan, memiliki tekad dan keberanian merencanakan langkah langkah tertentu yang

harus diambil keputusan oleh perempuan untuk menuju kebebasan yang menolak ketidaksetaraan gender, dan hal hal yang menganggap perempuan tidak bisa berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. (Putnamtong, 2010, p. 190).

#### **1.7.4 Prinsip Pemberdayaan**

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan berpedoman dengan prinsi pekerjaan sosial. Pemberdayaan harus berkolaborasi karena pada dasarnya yang berkuasa dan masyarakat sebagai *partnert* kerja. Proses pelaksanaan pemberdayaan akan memprioritaskan masyarakat sebagai subjek dan yang memiliki kekuasaan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan yang ada. Pengalaman sebelum pemberdayaan berindikasi terhadap pertimbangan kemampuan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Situasi yang berbeda di pedesaan dengan keberagaman yang banyak mengharuskan memberikan solusi yang berasal dari perbedaan dan faktor-faktor yang ada di lingkungan. Jaringan sosial menjadi sumber dukungan dalam menghadapi ketegangan yang terjadi, untuk meningkatkan kompetensi mengendalikan seseorang. Pemberdayaan yang berhasil diukur dari adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan mereka sendiri. Penguasa akan berproses untuk memberikan pemberdayaan yang dinamis, bersinergi, evolutif, dan mambangun ekonomi secara pararel (Suharto, 2005, p. 91;92).

#### **1.7.5 Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan aktif dari individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang memiliki dampak pada kehidupan banyak orang. Partisipasi yang dilakukan melalui aktivitas seperti menghadiri pertemuan, memberikan masukan, ikut serta dalam kegiatan, dan terlibat langsung dalam implementasi program. Partisipasi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program yang dibuat lebih relevan, efektif, dan sesuai denga kebutuhan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang memampukan mencapai kesejahteraan sosial secara merata.

Partisipasi masyarakat menurut *Theresia at all* (2015;196) mengemukakan bahwa :

“partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab”

Melalui partisipasi menciptakan keterlibatan dari masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat melalui partisipasi pasif, partisipasi informasi, partisipasi aktif, dan partisipasi kontrol. Partisipasi masyarakat memiliki berbagai manfaat melalui pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi karena memiliki kesempatan dan berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Melalui transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Membantu memastikan bahwa kegiatan dan kebijakan yang dilakukan diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat merasa memiliki tanggungjawab atas kegiatan, sehingga meningkatkan tujuan lebih cepat tercapai.

Maka, adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu adanya kesadaran dan pengetahuan, sumber daya, dan struktur mekanisme memfasilitasi masyarakat melalui musyawarah. Pelaksanaan penguatan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat sudah dilaksanakan oleh PKK secara keseluruhan dengan adanya pembagian per pos posyandu yang di masing-masing Dusun. Melalui rebug stunting PKK memanfaatkan sebagai kegiatan evaluasi bagi semua anggota PKK, dan mengundang masyarakat agar mengetahui sejauh mana perkembangan stunting di desa dengan menekankan terhadap dampak buruk stunting. Berdasarkan teori partisipasi *Theresia at all* bahwa sebuah kegiatan pemberian wawasan pengetahuan adanya partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesadaran melalui pengetahuan masyarakat mengetahui pentingnya berpartisipasi.

### 1.7.6 Stunting

Salah satu aspek paling penting dari tahapan tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan fisik, dan stunting adalah hambatan yang bisa memberikan dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan anak. Tidak hanya kesehatan anak yang terdampak, masa depan mereka sebagai sumber daya manusia yang berkualitas juga terancam karena terbatasnya kemampuan belajar mereka. Akibatnya, anak yang mengalami stunting pada masa kecilnya akan kesulitan mencari nafkah. Stunting merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, layanan kesehatan, dan kebijakan publik yang mengidentifikasi penyebab stunting yang tidak terlihat.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 mengemukakan bahwa :

“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun Pusat Data dan Informasi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Untuk mengidentifikasi anak yang mengalami stunting, WHO pun menggunakan indikator Tinggi Badan untuk Umur (TB/U) anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Seorang anak mengalami stunting jika tinggi badan untuk Umur anak berada di bawah minus 2 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-2 dari median referensi pertumbuhan WHO.
2. Seorang anak disebut mengalami stunting parah jika tinggi badan untuk umur anak berada di bawah minus 3 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-1 dari median referensi pertumbuhan WHO. (World Health Organization, 2015).

Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa sebab stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentu sangat mempengaruhi kemampuan anak dan berdampak pada prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas mereka (Sutarto, 2018). Sehingga Negeri ini dapat mengalami (*zero generation*) kekosongan pemimpin di masa yang akan datang (Perpres, 2017).

#### **1.7.7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat (PKK) menyebutkan bahwa :

“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah

yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga (Tim Penggerak PKK Pusat, 2010).

Kelembagan PKK disebut tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TP PKK ini meliputi Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21). Kelompok kerja (POKJA) sebagai pelaksana program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK :

- a) Pokja I, Penghayatan dan pengamalan Pancasila Penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bemsyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) mencakup lima (5) unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Berdasarkan observasi penelitian bahwa pokja 1 kader PKK Desa Bangsongan telah melaksanakan tuugas dan kewajibannya dengan melakukan gotong rotong dilaksanakan dengan membangun kerja sama yang baik, menumbuhkan kesadaran, kesetiakanwanan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan menghormati antar umat beragama antar sesama keluarga, warga, kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Agama Islam dan Hindu karena dua agama yang paling

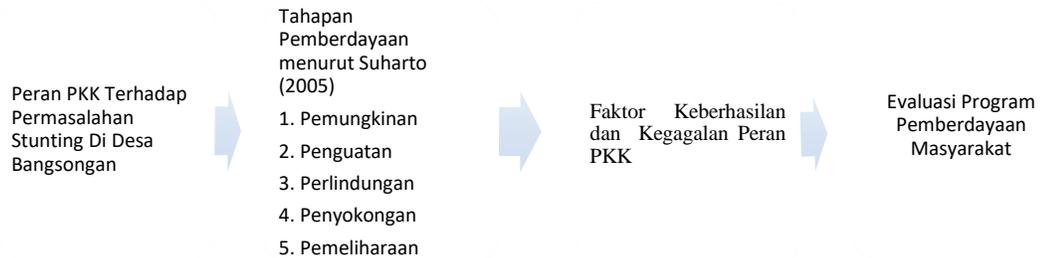
aktif ada kegiatan pengajian, santunan anak yatim, santunan janda, dan santunan untuk orang yang membutuhkan. Hindu juga melakukan kegiatan di Pura, iringan ogoh ogoh setiap tahunnya sebelum hari nyepi.

- b) Pokja II, Pendidikan dan keterampilan, yang mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Berdasarkan observasi penelitian bahwa kader PKK dalam kepengurusan di pokja II telah mengadakan pendidikan dalam survei lingkungan belajar yang sifatnya pemberdayaan, membantu penyebaran undangan stunting kepada masing masing RT/RW. Karena di Bangsongan ada Tapos, Paud, dan TK yang guru pengajarnya ibu ibu PKK. Kegiatan koperasi simpan pinjam yang dimana nasabah bisa diluar dari kader PKK yang penting menyanggupi pembayaran angsuran. Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelatih/*Training of trainer (TOT)*.
- c) Pokja III, Pangan 18 Prioritas program pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang) sesuai potensi daerah. Mengoptimalkan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) dengan tanaman pangan dan tanaman produktif/keras, minimal untuk memenuhi keperluan keluarga dan tabungan serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Berdasarkan observasi penelitian bahwa kader PKK dalam kepengurusan di pokja III dengan melakukan pelatihan pembibitan (KRPL), menghimbau perempuan untuk mengikuti sekoper (sekolah perempuan) disetiap hari kamis setiap minggunya yang memiliki

tujuan mengembangkan pengetahuan perempuan dalam bidang berjualan, bercocok tanam, dan keterampilan yang bisa dijadikan sumber keuangan rumah tangga. Terutama di bidang UMKM pokja III yang bahkan produk *home made* ada yang disalurkan ke rumah makan Titin yang terkenal di Jawa Timur. Produk UMKM mulai dari keripik, kue basah, kue kering, dan sayur sayuran.

- d) Pokja IV, Kesehatan merupakan proiritas utama keluarga dengan memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prefalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan pemberian suplemen zat gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam (6) bulan, Makanan Pendamping (MP ASI) dan pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, menjadikan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kebiasaan sehari-hari dengan cuci tangan pakai sabun, menggunting kuku dan optimalisasi posyandu. Berdasarkan observasi penelitian bahwa kader PKK dalam kepengurusan di pokja IV berfokus pada kesehatan masyarakat desa dengan disediakan fasilitas Puskesmas yang beroperasi setiap senin-sabtu. Kegiatan Posyandu, Posbindu, dan Poslansia. Memberikan PMT kepada balita Stunting disetiap minggunya, mengawasi perkembangan anak stunting, dan melakukan sosialisasi menjaga kebersihan rumah, serta penyampaian mengenai stunting bagi semua kalangan. Selain itu, meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin.

## 1.8 Bagan Alur Berpikir atau Penulisan



## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode ini digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Borg dan Gall yang diikuti oleh (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2015) mengemukakan :

“Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang di dapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Sugiyono (2015: 9), yaitu bahwa metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak.

## 1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penulis akan mengidentifikasi permasalahan atau situasi tertentu sehingga dapat mengidentifikasi kasus dan informasi yang dipelajari dari beberapa contoh fenomena dalam bentuk pertanyaan. Tujuan studi kasus ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang terhadap lingkungan, individu, lembaga, dan masyarakat. Cresswell mengemukakan bahwa studi kasus membentuk struktur analisis kedalam bentuk naratif tertulis (Cresswell, 1998).

## 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1.9.3.1 Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah aktivitas penulisan fenomena yang dilakukan secara sistematis dan secara langsung. Pengamatan dilakukan secara terlibat atau tidak terlibat. Menurut Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar yang menjadi awalan semua ilmu pengetahuan untuk menggali penemuan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012). Pengamatan yang dilakukan merupakan pengamatan dengan menjadikan peneliti turut hadir mengikuti kegiatan ditempat pengambilan data. Pengamatan ini tidak mengakibatkan perubahan pada aktivitas yang bersangkutan dan tidak menutupi diri penulis untuk meneliti di desa Bangsongan ( Muhammad Idrus, 2009).

**Tabel 1.9.3 Jadwal Observasi**

<b>Tanggal</b>	<b>Tempat</b>	<b>Keterangan</b>
18 September 2023	Desa Bangsongan	Observasi tempat penelitian
19 September 2023	Desa Bangsongan	Mengikuti kegiatan rembug stunting di Balai Desa Bangsongan

20 September 2023	Desa Bangsongan	Mengamati kegiatan posyandu
21 September 2023	Desa Bangsongan	Mengamati kegiatan PMT

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2023

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti akan menggali dan berkomunikasi lebih mendalam kepada informan. Wawancara dilakukan melalui pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, saran, dan ide melalui kegiatan tanya jawab. Sehingga penulis dapat mengkonstruksikan (merumuskan) makna dalam kegiatan tanya jawab terhadap pembicaraan ( Muhammad Idrus, 2009). Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan yang menjadi alternatif jawabannya telah disiapkan/diprediksi oleh peneliti.

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden/informan diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti melakukan pengumpulan datanya. Pengumpulan data dilakukan ke beberapa informan yang diwawancarai di lokasi penelitian. Penulis menggunakan cara ini agar menemukan informasi lebih mendalam serta akurat tentang peran PKK dalam memberdayakan masyarakat desa yang berfokus pada permasalahan stunting di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan menggunakan media mencatat dan rekaman suara menggunakan ponsel.

Wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan peneliti membacakan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden sesuai dengan indikator yang telah disusun sebelumnya berdasarkan hasil observasi. Data primer melalui wawancara ini yang mau diambil oleh peneliti adalah mengenai besaran anggaran dana desa, pengetahuan mengenai stunting, perkembangan stunting, penyebab masalah stunting di desa, faktor pendukung/penghambat

stunting, saran, keluhan terkait pemberdayaan masyarakat, peran dari pemerintahan desa dan PKK, kekurangan/kelebihan pemberdayaan yang dilaksanakan, dan dari hasil wawancara bisa menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya.

### **1.9.3.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen tertulis, laporan, dan surat surat resmi. Penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data data yang berasal dari dokumentasi tertulis, Dokumen yang digunakan merupakan bentuk teks terdiri dari catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik dapat mencakup dokumen resmi seperti surat desa, profil desa, dan jumlah anggaran dana desa yang diberikan melalui bukti laporan oleh pemerintahan desa. Dokumen lain juga berupa catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, media sosial, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (Husaini, 2001).

Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder profil desa, jumlah masyarakat, buku pedoman, RPMJMDES, surat program stunting, angka balita, angka anak terdampak stunting, daftar program terlaksananya stunting, dan buku PKK desa.

### **1.9.4 Sampel atau informan**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ada di tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penelitian ini sampel penelitian diambil di Desa Bangsongan. Situasi sosial yang ada di desa Bangsongan terdiri dari 3 elemen yaitu : tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Dalam mengambil sampel maka dilakukan teknik samplis untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. *Probability Sampling* meliputi *simple random*, *proporionate sratified random*, dan *area random*. *Non-probability Sampling* meliputi, *sampling sistematis*, *Sampling Kuota*, *Sampling Aksidental*, *Purposive Sampling* *Sampling* *Jenuh*, dan *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2012).

Penulis menggunakan teknik *Non-probability Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dilakukan penulis adalah dengan mengklasifikasikan potensi responden untuk bisa mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKK dalam menangani stunting di Desa Bangsongan.



**Tabel 1.9.4 Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan	Jabatan	Landasan
1	1. Supardi S.Pd 2. Dewi Firda	Gambaran kebijakan terhadap program desa Bangsongan	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat desa	Pemimpin pemerintahan desa, dan pengurus bidang kerja pemerintahan desa
2	1. Erna Ningsih 2. Elmina Yudha Larent	Gambaran peran PKK memberdayakan masyarakat dalam penanganan stunting	Kepengurusan PKK	Pelaksana Program Penanganan Stunting desa
3	1. Rina	Gambaran peran dari Puskesmas Desa Bangsongan, proses pelaksanaan kegiatan program stunting, serta pendampingan.	Bidan Desa	Pelayan Kesehatan Desa
4	1. Andika	Gambaran pendampingan kegiatan desa, dan berperan mendukung program stunting	Pendanping Desa	Fasilitator Pelaksana Program Stunting

5	1. Samsul 2. Zainal	Gambaran partisipasi dalam membantu pendataan keluarga stunting	Ketua RT/RW	Perwakilan Masyarakat
6	1. Sunarto	Gambaran penerima manfaat	Masyarakat umum	Perwakilan Masyarakat
7	1. Riska Wahyu 2. Anis	Gambaran penerima manfaat sebagai keluarga terdampak	Keluarga anak yang stunting	Perwakilan Keluarga Terdampak Stunting

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2023

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah perwakilan dari keseluruhan sektor di desa berdasarkan jabatan, dan gender. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, peneliti sudah melakukan observasi dan mendapat izin dari Desa Bangsongan untuk menetapkan siapa saja yang akan menjadi informan. Pemilihan informan dipilih yang berpotensi mampu menjawab setiap pertanyaan dari peneliti. Hasil pemilihan narasumber dibantu oleh pemerintahan desa yang bisa dan mau memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. menyesuaikan pernyataan yang benar berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti.

### **1.9.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Pedoman wawancara dalam penelitian ini sebagai alat memori yang berisi beberapa topik pertanyaan dalam bentuk wawancara terstruktur. Instrumen penelitian atau pedoman wawancara dalam penelitian ini akan dijelaskan secara detail di tabel 1.9.5



**Tabel 1.9.5 Instrumen Penelitian**

<b>Konsep/Teori</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Narasumber</b>
Konsep Pemberdayaan (Suharto)	<p><b>Pemungkinan,</b> terciptanya situasi yang mendukung untuk memunculkan potensi dalam masyarakat sehingga dapat dikenali berdasarkan penyebab permasalahan yang bertujuan membebaskan masyarakat dari hambatan yang menghambat perkembangan masyarakat.</p>	<p>Masalah stunting yang dialami masyarakat desa</p>	<p>1 Apa saja hal yang menyebabkan terjadinya stunting? 2 Apakah terjadi peningkatan penderita stunting dari tahun sebelumnya? 3 Apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi? 4 Apakah terdapat kebiasaan masyarakat yang menyebabkan terjadinya stunting?</p>	<p>1. Kepala Desa 2. PKK Desa 3. Bidan Desa 4. Masyarakat 5. Pendamping Desa 6. Keluarga anak yang stunting</p>
		<p>Kesadaran</p>	<p>1. Apakah masyarakat menyadari dampak buruk dari stunting? 2. Apakah masyarakat menyadari kebiasaan yang sering dilakukan berdampak pada lahirnya stunting? 3. Apakah masyarakat menyadari pentingnya mengetahui tentang stunting?</p>	<p>1. Kepala Desa 2. PKK Desa 3. Bidan Desa 4. Masyarakat 5. Ketua RT/RW 6. Keluarga anak yang stunting</p>

		Potensi	<p>1 .Apa saja potensi sumber daya manusia dan pangan yang ada pada masyarakat sehingga mampu mendukung pencegahan stunting?</p> <p>2 Apa saja upaya yang dilakukan dalam mendorong masyarakat untuk mengusahakan potensi yang sudah ada?</p> <p>3 Apakah perencanaan pelaksanaan program PKK sudah sesuai dengan potensi desa?</p> <p>4 Apakah terdapat dukungan pemerintah desa baik berupa anggaran maupun program kebijakan dalam pencegahan atau pemberantasan stunting?</p>	<p>1. Kepala Desa</p> <p>2. PKK Desa</p> <p>3. Masyarakat</p> <p>4. Ketua RT/RW</p>
	<b>Penguatan</b> , yang dimaksud dengan penguatan yaitu	Upaya Peningkatan Pengetahuan	1. Apakah terdapat program peningkatan pengetahuan	<p>1. PKK Desa</p> <p>2. Kepala Desa</p> <p>3. Masyarakat</p>

<p>dilakukannya penguatan pada aspek wawasan pengetahuan dan keterampilan suatu kelompok masyarakat sasaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan mempengaruhi kepentingan anggota masyarakat.</p>		<p>masyarakat tentang stunting yang dilakukan oleh PKK?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang stunting?</p> <p>3. Bagaimana respon atau persepsi masyarakat terhadap program peningkatan kesadaran dan pengetahuan tersebut?</p> <p>4. Apakah terdapat partisipasi yang tinggi dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut?</p> <p>5. Apakah program PKK dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat telah cukup berhasil?</p>	<p>4. Pendamping Desa</p> <p>5. Keluarga anak yang stunting</p>
	<p>Upaya peningkatan keterampilan</p>	<p>1. Apakah terdapat program pelatihan dari PKK yang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola bahan pangan untuk mencegah terjadinya stunting?</p>	<p>1. PKK Desa</p> <p>2. Bidan Desa</p> <p>3. Masyarakat</p> <p>4. Kepala Desa</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana bentuk pelatihan yang dimaksud? Apa saja ketrampilan yang menjadi tujuan dari pelatihan yang dilakukan?</li> <li>3. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat?</li> <li>4. Berapa besar sumber daya baik berupa anggaran dan sumber daya manusia yang turut serta dalam pelaksanaan pelatihan tersebut?</li> <li>5. Apakah terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam pelatihan yang dimaksud?</li> <li>6. Apakah program pelatihan tersebut telah cukup memadai meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mencegah stunting?</li> </ol>	
	<p><b>Perlindungan,</b> Perlindungan (Protecting), adanya</p>	Menciptakan keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK dalam mengatasi stunting masuk dalam program pemerintahan desa?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat</li> <li>2. Pemerintahan Desa</li> <li>3. Pendamping Desa</li> </ol>

<p>perlindungan terhadap kelompok masyarakat sasaran agar tidak tertindas dalam mendapatkan berbagai sumber kehidupan yang layak.</p>		<p>2. Apakah program PKK dalam mengatasi stunting telah memanfaatkan anggaran, dan sarana prasaran dengan memadai?</p> <p>3. Apakah program PKK dalam mencegah stunting telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?</p>	<p>4. Masyarakat</p> <p>5. Keluarga anak yang stunting</p>
	<p>Menciptakan pemerataan</p>	<p>1. Apakah program mengenai stunting sudah dilakukan secara merata terutama pada kelompok masyarakat miskin dan yang rentan?</p> <p>2. Siapa saja yang menerima manfaat dari peran PKK?</p> <p>3. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari PKK?</p> <p>4. Apakah anda kerap menemui kesulitan untuk mengakses program/kegiatan di PKK?</p>	<p>1. PKK Desa</p> <p>2. Bidan Desa</p> <p>3. Pendamping Desa</p> <p>4. Pemerintahan Desa</p> <p>5. Ketua RT/RW</p>

			5. Berapa banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan program PKK?	
--	--	--	---	--



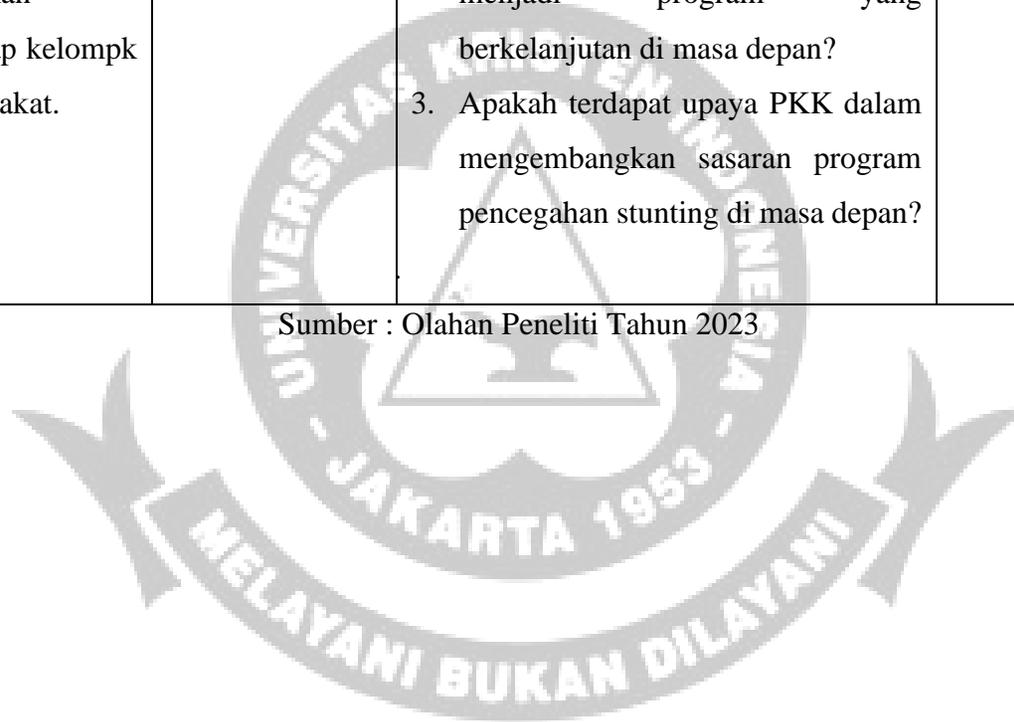
	<p><b>Penyokongan,</b> yang dimaksud dengan penyokongan yaitu adanya upaya pendampingan untuk memberikan bimbingan dalam bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat sasaran. Adanya beberapa pihak yang mendukung mengatasi permasalahan untuk meningkatkan</p>	<p>Pendampingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah PKK melakukan pendampingan dan pembimbingan bagi masyarakat terdampak maupun potensial mengalami stunting?</li> <li>2. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan?</li> <li>3. Apakah ada bimbingan secara bertahap dalam mencapai tujuan pelaksanaan program yang dilakukan PKK?</li> <li>4. Apakah terdapat anggaran dan sumber daya manusia dari PKK yang melakukan pendampingan terhadap keluarga terdampak maupun potensial mengalami stunting?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK Desa</li> <li>2. Masyarakat</li> <li>3. Keluarga anak yang stunting</li> </ol>
--	---	---------------------	--	--

	kualitas hidup masyarakat.			
		Kualitas hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kegiatan PKK dalam mencegah dan mengatasi masalah stunting telah cukup berhasil?</li> <li>2. Apakah terdapat penurunan jumlah bayi stunting dalam beberapa tahun terakhir?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK Desa</li> <li>2. Masyarakat</li> <li>3. Pendamping Desa</li> <li>4. Bidan Desa</li> </ol>

			<p>3. Apakah program pencegahan stunting masih akan terus dilaksanakan?</p> <p>4. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi pencegahan stunting yang dilakukan oleh PKK?</p> <p>5. Bagaimana bentuk monitoring dan kapan evaluasi terhadap program pencegahan stunting dilakukan?</p> <p>6. Apakah terdapat upaya pengembangan program pencegahan stunting oleh PKK di masa depan?</p>	<p>5. Keluarga anak yang stunting</p>
	<p><b>Pemeliharaan,</b> memastikan kondisi kondusif terus berlangsung agar terjadi keseimbangan dan keselarasan di tengah-tengah masyarakat,</p>	<p>Pelibatan pihak lain</p>	<p>1. Apakah terdapat dukungan yang maksimal dari pemerintah desa, masyarakat, kelompok masyarakat maupun tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting?</p> <p>2. Apakah terdapat pembagian tugas dan wewenang diantara anggota PKK maupun pihak lain dalam</p>	<p>1. PKK Desa</p> <p>2. Ketua RT/RW</p> <p>3. Pendamping Desa</p> <p>4. Masyarakat</p> <p>5. Bidan Desa</p> <p>6. Keluarga anak yang stunting</p>

	<p>sebagai pendistribusi kekuasaan dan kebijakan terhadap kelompok masyarakat.</p>		<p>pelaksanaan program pencegahan stunting? Apakah program pencegahan stunting oleh PKK menjadi program yang berkelanjutan di masa depan?</p> <p>3. Apakah terdapat upaya PKK dalam mengembangkan sasaran program pencegahan stunting di masa depan?</p>	
--	--	--	--	--

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2023



### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Dalam pendekatan kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam, dan dilakukan secara terus menerus.

#### **1.9.6.1 Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini penulis mengambil data ke lapangan menjadi data primer yang dimulai dengan observasi. Observasi yang dilakukan di Desa Bangsongan yaitu merangkum kegiatan kegiatan penanganan stunting yang diterapkan selama 2 minggu dengan mengikuti rembug stunting, rapat pleno, musrenbangdes, posyandu, pembuatan makanan PMT lokal dan PKK, pembagian bibit untuk pertahanan pangan keluarga, mengikuti proses penjualan UMKM melalu Bumdes, dan melakukan pengawasan terhadap balita yang terdampak dan berpotensi terdampak.

Pada tahapan wawancara penulis memfokuskan kepada responden yang berpotensi menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Tujuan ini adalah untuk melihat peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat melalui program penanganan stunting. Menemukan fakta kehidupan sosial masyarakat Desa Bangsongan yang mendukung. Untuk itu penulis melakukan klasifikasi berdasarkan jabatan, penerima manfaat, dan yang belum mendapatkan manfaat dari sebuah program yang telah dibuat.

#### **1.9.6.2 Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data juga memudahkan kesimpulan sementara dan dapat merencanakan langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dengan adanya tabel terkait data desa, struktur kepengurusan PKK dan pemerintahan desa, alur berpikir, daftar operasional variabel, UMKM desa, penelitian sebelumnya, dalam bentuk grafik data balita yang terdampak stunting, dan data perbandingan prevalensi stunting.

Penyajian data ini diambil sebagai data sekunder yang didapatkan dari pemerintahan desa, BUMDES, dan PKK.

### **1.9.6.3 Penarikan kesimpulan**

Aktivitas merumuskan kesimpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya, simpulan ini dapat berupa sementara maupun simpulan akhir. Dari secara keseluruhan proses analisis data yang dilakukan penulis ingin menemukan berdasarkan hasil observasi sebelumnya ada yang apatis, belum memahami mengenai stunting, dan proses pemberdayaan yang dilakukan akan berhasil apabila seluruh elemen masyarakat mendukung penanganan stunting.

## **1.10 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, landasan teoritik dan konseptual, bagan alur berpikir atau penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : PROFIL DESA BANGSONGAN**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum desa Bangsongan yang menjelaskan terkait sejarah Desa Bangsongan, struktur pemerintahan desa, jumlah penduduk, geografi wilayah desa, perekonomian desa, sosial budaya, dan infrastruktur desa yang akan menjelaskan sasaran dan informasi penelitian

### **BAB III : PERAN PKK DALAM PENANGANAN STUNTING**

Dalam bab ini menjelaskan peran PKK sebagai temuan dan interpretasi data dalam penyelenggaraan program stunting. Bab ini berfokus pada peran PKK dengan beberapa pelaksanaan program selama tahun 2023 dengan konsep pemberdayaan melalui pelaksanaan posyandu, sosialisasi, pelaksanaan PMT, pembantuan pertahanan pangan, dan pengevaluasian kegiatan.

#### **BAB IV : FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PERAN PKK MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pada bab ini menjelaskan proses dari pelaksanaan program stunting yang dilakukan oleh PKK dengan adanya faktor keberhasilan dan penghambat peran PKK dengan adanya pemerintahan desa yang menganggarkan, dan masyarakat yang terdampak stunting dan tidak terdampak stunting dapat menerima manfaat yang sama yang dikaitkan untuk mewujudkan turunya prevalensi stunting, dan perekonomian yang berkelanjutan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab bab sebelumnya, penemuan penelitian serta dapat menjawab pertanyaan penelitian yang memberikan saran saran yang berguna dan mendukung bagi penyusunan hasil penelitian.

